
Analisis Peran Sektor Pertambangan dalam Pembangunan Regional Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Menerapkan Pendekatan Analisis Model *Input-Output*

Rizky Syaputra¹, Andyono Broto Santoso², Nofrohu Retongga³, Lia Alfianita⁴,
Frida Rosidatul Mu'awanah⁵, Nur Widi Astanto Agus Tri Heriyadi⁶

¹²³⁴⁵Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik dan Desain, Institut Teknologi Sains Bandung, Cikarang

⁶Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains & Teknologi AKPRIND, Yogyakarta

Email: rizkysy1@gmail.com¹

ABSTRACT

Sustainable regional development aims to increase regional competitiveness, increase economic growth, reduce regional inequality, and improve people's lives. South Sumatra Province is one of the provinces in Indonesia with excellent coal mining potential and can encourage sustainable regional development. The development of a sector cannot be separated from the support of other sectors, so optimizing the allocation of routine and development budgets into the economic sector is essential. For this reason, it is necessary to calculate the output impact analysis and analysis of the impact of gross value added on government expenditure using the input-output model. The calculation through this input-output model shows how much influence the increase or decrease in output and gross value added has on government expenditure. The role of the coal mining sector with other sectors and the condition of its existence in the economy need to be studied using the input-output table to determine the part of the mining sector in the regional economy. It can be concluded that the coal mining sector is still one of the leading sectors in economic growth in South Sumatra Province.

Keywords: coal mining, input-output, South Sumatra Province.

INTISARI

Pembangunan regional berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertambangan batubara yang besar dan mampu mendorong pembangunan regional berkelanjutan di daerahnya. Perkembangan suatu sektor tidak terlepas dari dukungan sektor lain, sehingga optimalisasi alokasi anggaran rutin dan pembangunan ke dalam sektor perekonomian merupakan hal penting. Untuk itu diperlukan perhitungan analisis dampak *output* dan analisis dampak nilai tambah bruto terhadap pengeluaran pemerintah menggunakan model *input-output*. Dalam perhitungan melalui model *input-output* ini, dapat diketahui seberapa besar pengaruh kenaikan atau penurunan *output* dan nilai tambah bruto terhadap pengeluaran pemerintah. Peranan sektor pertambangan batubara dengan sektor-sektor lain dan kondisi keberadaannya dalam perekonomian perlu dikaji dengan menggunakan tabel *input-output* untuk mengetahui peran sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: *input-output*, pertambangan batubara, Provinsi Sumatera Selatan,

PENDAHULUAN

Pembangunan regional berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumberdaya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan

masyarakat pada suatu periode tertentu. Sektor pertambangan memiliki peranan yang cukup penting dalam mendorong pengembangan wilayah. Pertambangan dapat menjadi pengendali dalam penentuan arah pembangunan wilayah di sekitarnya (*local development*) maupun dalam lingkup regional (*regional development*) melalui *multiplier effect* maupun *linkage effect*. Disamping analisis pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, hal ini digunakan juga untuk menentukan arah pembangunan yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat diartikan sebagai pembangunan dengan menggunakan sumberdaya alam/energi yang produktif dan efisien, tanpa memberikan (seminimal mungkin) dampak negatif pada manusia dan lingkungan alam. Pembangunan berkelanjutan memiliki dua konsep utama, yakni konsep “kebutuhan” dan “keterbatasan” yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap pembangunan pasti membutuhkan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sebagai pendukung dan pelaksana pembangunan itu sendiri. Upaya pembangunan juga dihadapkan pada banyak keterbatasan, terutama keterbatasan sumberdaya alam yang telah terkuras untuk kebutuhan pembangunan tersebut dan pencemaran yang diakibatkan oleh proses ekstraksi dan pengolahannya (Rifai dkk., 2007).

Pembangunan berkelanjutan dalam sektor pertambangan sebagai integrasi dari nilai ekonomi, lingkungan dan tanggung jawab sosial di sektor tersebut, diantaranya adalah memberikan nilai ekonomi berupa keuntungan dari pajak dan royalti, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk mineral tambang. Sehingga adanya keseimbangan manfaat dalam penyediaan produk-produk dari tambang mineral untuk kebutuhan masyarakat dengan dampak pembangunan regional berkelanjutan potensial terhadap lingkungan dan sosial masyarakat dengan menjamin adanya transparansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperkirakan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh sektor pertambangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pendekatan model analisis *input-output*, dengan memanfaatkan data tabel *input-output* Indonesia tahun 2008 hingga 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Alat yang digunakan sebagai pengukur dampak dalam penelitian ini adalah pengganda *output*, pendapatan, surplus, pajak, nilai tambah bruto, keterkaitan kedepan (*forward linkage*), dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*).

METODE

Penelitian ini mempergunakan data tabel *input-output* (IO) tipe terbuka dari Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 (BPS, 2015) nilai transaksi domestik atas harga produsen untuk 11 sektor (Suseno, 2020). Untuk melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan penyelarasan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam tabel IO terdapat beberapa sektor dengan kode atau penomoran seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kode sektor tabel IO

Kode	Sektor	Kode	Sektor
1	Pertanian	204	Pajak tak langsung netto
2	Pertambangan dan penggalian	209	Nilai tambah bruto
3	Industri manufaktur non-migas	210	Jumlah input
4	Listrik, gas kota, dan air minum	301	Pengeluaran konsumsi rumah tangga
5	Bangunan	302	Pengeluaran konsumsi pemerintah
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	303	Pembentukan modal tetap
7	Angkutan dan komunikasi	304	Perubahan stok
8	Lembaga keuangan dan jasa perusahaan	305	Ekspor barang dan jasa
9	Pemerintahan umum dan jasa	309	Jumlah permintaan akhir
180	Jumlah permintaan antara	310	Jumlah permintaan
190	Jumlah <i>input</i> antara	409	Jumlah impor barang dan jasa
200	Impor	509	Margin perdagangan dan biaya pengangkutan
201	Upah dan gaji	600	Jumlah <i>output</i>
202	Surplus usaha	700	Jumlah penyediaan
203	Penyusutan		

Dalam merencanakan pengembangan suatu wilayah saat ini kerap menggunakan tinjauan sistem multi sektoral. Tinjauan multi sektoral dalam suatu perekonomian akan memperjelas hubungan saling mempengaruhi antara sektor. Teknik analisis *input-output* (IO) merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan dalam melakukan tinjauan multi sektoral tersebut. Dalam perkembangan sering digunakan dalam perencanaan ekonomi nasional maupun wilayah. Kerap perangkat ketersediaan data yang dibutuhkan bagi kepentingan penerapan model analisis IO tersedia pada tingkat nasional. Namun mengingat manfaat yang sangat penting yang dapat diperoleh dari hasil analisis IO, maka berbagai usaha dilakukan untuk menggunakan data pada tingkat nasional untuk diturunkan pada skala wilayah (Uguy, 1994).

Tabel IO pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling berkaitan antar sektor, dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. Dengan menggunakan tabel IO dapat dilihat bagaimana *output* dari sektor ekonomi didistribusikan ke sektor-sektor lainnya dan bagaimana pula suatu sektor memperoleh *input* yang diperlukan dari sektor-sektor lainnya (Heriawan, 2008). Dalam suatu model IO yang bersifat terbuka dan statis, transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan tabel IO harus memenuhi tiga asumsi atau prinsip dasar, yaitu:

- 1) Keseragaman (*homogeneity*), yaitu asumsi bahwa setiap sektor hanya memproduksi satu jenis *output* (barang dan jasa) dengan struktur *input* tunggal (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis antar *output* dari sektor yang berbeda.
- 2) Kesebandingan (*proportionality*), yaitu asumsi bahwa kenaikan penggunaan *input* oleh suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan *output* yang dihasilkan.
- 3) Penjumlahan (*additivity*), yaitu asumsi bahwa jumlah pengaruh kegiatan produksi diberbagai sektor merupakan penjumlahan dari pengaruh pada masing-masing sektor tersebut.

Untuk memperoleh gambaran tentang tabel IO disusun, maka struktur tabel IO dapat dilihat pada Tabel 2. Pada tabel IO dibagi menjadi 3 kuadran yaitu (Murbarani, 2009):

- 1) Kuadran I berisikan transaksi *input* antara yaitu nilai pengeluaran untuk barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* dalam unit produksinya.
- 2) Kuadran II berisikan transaksi permintaan akhir yaitu nilai pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi langsung dan tidak digunakan untuk proses produksi. Permintaan akhir terdiri dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran atau konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, dan sisa stok produksi yang belum dikonsumsi.
- 3) Kuadran III berisikan *input* primer yang menunjukkan besarnya balas jasa yang dibayarkan kepada faktor produksi yaitu upah atau gaji, surplus usaha, pajak, depresiasi, subsidi, dan impor. Oleh karena itu, kuadran III juga disebut dengan *value added*.

Tabel 2. Tabel IO untuk sistem perekonomian tiga sektor produksi

Alokasi Output Struktur Input			Permintaan Antara Sektor Produksi			Permintaan Akhir	Jumlah Output
			1	2	3		
			Kuadran I			Kuadran II	
<i>Intermediate Input</i>	<i>Production Sector</i>	1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	F_1	X_1
		2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	F_2	X_2
		3	X_{31}	X_{32}	X_{33}	F_3	X_3
			Kuadran III				
<i>Input Primer</i>			V_1	V_2	V_3		
<i>Jumlah Input</i>			X_1	X_2	X_3		

Pada Tabel 1, X_i adalah total nilai *input* sektor produksi i yang didapat dari persamaan 1:

$$X_i = \sum_{j=1}^3 X_{ij} + F_i \dots\dots\dots(\text{Pers. 1})$$

Untuk semua, i adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, dimana X_{ij} adalah *output* sektor i yang digunakan sebagai *input* j ; F_i adalah permintaan akhir terhadap sektor i , dan X_i adalah jumlah *output* sektor i . Kemudian X_j adalah total *output* yang nilainya sama dengan total *input*. X_j yang bisa dihitung menggunakan persamaan 2:

$$X_j = \sum_{i=1}^3 X_{ij} + V_j \dots\dots\dots(\text{Pers.2})$$

Pengaruh atau dampak pengganda dalam analisis tabel IO dapat dijabarkan (Mudzakir, Abdul Kohar, 2006; Suseno, 2018) sebagai berikut :

- 1) Dampak awal (*initial impact*) adalah dampak peningkatan *output* sektor yang bersangkutan (nilai dampak awal dengan satu),
- 2) Dampak langsung adalah dampak pembelian langsung,
- 3) Dampak tak langsung adalah dampak pendukung industri,
- 4) Dampak imbas konsumsi (*consumption induced effect*) adalah dampak peningkatan konsumsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengganda *Output*

Hasil pengganda *output* untuk setiap sektor dapat dilihat pada Tabel 3. Sektor yang memiliki pengganda *output* tertinggi adalah sektor 3 (pertambangan batubara) memiliki pengganda *output* senilai 1,976. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan permintaan akhir pada sektor 3 (pertambangan batubara) sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan *output* perekonomian secara keseluruhan sebesar Rp 1,976 juta. Sektor penggalian merupakan sektor yang memiliki pengganda *output* terkecil yaitu sebesar 1,256. Hal ini menunjukkan jika permintaan akhir dari sektor penggalian meningkat sebesar 1 juta rupiah maka peningkatan *output* perekonomian semua sektor hanya meningkat sebesar Rp 1,256 juta. Berdasarkan hasil perhitungan pengganda *output*, strategi pemerintah untuk menjadikan sektor pertambangan sebagai stimulus bagi pertumbuhan perekonomian daerah Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi prioritas utama, sektor penggalian menjadi prioritas terakhir, hal ini dikarenakan pada sektor penggalian ini tidak banyak membutuhkan *input* atau bahan baku dari sektor-sektor lainnya.

Tabel 3. Hasil pengganda *output* untuk setiap sektor

No	Sektor	Pengganda <i>Output</i>
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1,37543
2	Pertambangan minyak dan gas bumi	1,30277
3	Pertambangan batubara	1,97620
4	Penggalian	1,25656
5	Industri makanan, minuman, tembakau	1,88763
6	Listrik gas dan air bersih	1,77433
7	Bangunan atau konstruksi	1,97484
8	Perdagangan, hotel dan restoran	1,35673
9	Pengangkutan dan komunikasi	1,61226
10	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,33297
11	Jasa-jasa	1,53912

2. Pengganda Pendapatan

Pengganda pendapatan untuk setiap sektor dapat dilihat pada Tabel 4. Dapat diketahui bahwa angka pengganda pendapatan terbesar adalah sektor 6 (listrik, gas, dan air bersih) memiliki angka pengganda pendapatan terbesar yaitu sebesar 2,236. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan 1 juta rupiah pada permintaan akhir sektor 6 akan meningkatkan pendapatan pekerja di semua sektor sebesar Rp 2,236 juta rupiah. Sedangkan sektor terendah yang memiliki pengganda pendapatan bernilai 1,131 pada sektor 4 (penggalian). Selain itu, sektor pertambangan batubara memiliki angka pengganda pendapatan sebesar 1,976. Sektor pertambangan batubara adalah sektor dengan nilai pengganda pendapatan terbesar kedua setelah sektor 6, hal ini menyatakan bahwa nilai pengganda pendapatan sektor pertambangan batubara masih menjadi salah satu sektor pemacu pendapatan regional Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4. Hasil pengganda pendapatan untuk setiap sektor

No	Sektor	Pengganda <i>Input</i>
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1,45714
2	Pertambangan minyak dan gas bumi	1,31354
3	Pertambangan batubara	1,97613
4	Penggalian	1,13135
5	Industri makanan, minuman, tembakau	1,97090

6	Listrik gas dan air bersih	2,23640
7	Bangunan atau konstruksi	1,70331
8	Perdagangan, hotel dan restoran	1,27570
9	Pengangkutan dan komunikasi	1,83590
10	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,50924
11	Jasa-jasa	1,18294

3. Pengganda Surplus

Berdasarkan perhitungan pengganda surplus pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai pengganda surplus terbesar adalah sektor 7 (sektor bangunan atau konstruksi) sebesar 3,835. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan permintaan akhir atau *output* pada sektor 7 sebesar 1 juta rupiah maka akan meningkatkan surplus usaha secara keseluruhan sebesar Rp 3,835 juta. Sektor yang memiliki nilai pengganda terendah adalah sektor 4 (penggalian) yaitu 1,158. Nilai tersebut disebabkan karena sektor 4 tidak memberikan surplus yang besar untuk sektor lain. Selain itu, sektor pertambangan batubara memberikan surplus sebesar 1,983 yang memberikan pengaruh bagi sektor lainnya secara keseluruhan secara tidak signifikan.

Tabel 5. Hasil pengganda surplus untuk setiap sektor

No	Sektor	Pengganda Surplus
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1,24130
2	Pertambangan minyak dan gas bumi	1,29614
3	Pertambangan batubara	1,98362
4	Penggalian	1,15876
5	Industri makanan, minuman, tembakau	2,40440
6	Listrik gas dan air bersih	3,36234
7	Bangunan atau konstruksi	3,83522
8	Perdagangan, hotel dan restoran	1,24447
9	Pengangkutan dan komunikasi	1,79473
10	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,18251
11	Jasa-jasa	2,46227

4. Pengganda Pajak

Perhitungan pengganda pajak pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sektor 6 (listrik, gas, dan air bersih) memberikan nilai pengganda paling besar dan nilainya sangat signifikan dibandingkan sektor lain. Sektor 6 memberikan nilai pengganda pajak sebesar 7,201, artinya peningkatan permintaan akhir pada sektor 6 sebesar 1 juta rupiah akan memberikan peningkatan pajak dari seluruh sektor di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 7,201 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 6 memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan pajak secara keseluruhan. Sektor penggalian merupakan sektor yang memiliki nilai pengganda pajak paling rendah yaitu 1,146. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor penggalian tersebut tidak begitu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pajak.

Tabel 6. Hasil pengganda pajak untuk setiap sektor

No	Sektor	Pengganda Pajak
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1,81298
2	Pertambangan minyak dan gas bumi	1,30201
3	Pertambangan batubara	1,98232
4	Penggalian	1,14658
5	Industri makanan, minuman, tembakau	1,85821
6	Listrik gas dan air bersih	7,20157
7	Bangunan atau konstruksi	2,54462
8	Perdagangan, hotel dan restoran	1,18518
9	Pengangkutan dan komunikasi	1,63910
10	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,28754
11	Jasa-jasa	2,92690

5. Pengganda Nilai Tambah Bruto

Pada Tabel 7, dapat dilihat nilai pengganda nilai tambah bruto yang terbesar adalah sektor 5 (industri makanan, minuman, tembakau) yaitu 2,075. Apabila permintaan akhir pada sektor 5 ditingkatkan sebesar 1 juta rupiah maka nilai tambah untuk seluruh sektor di Provinsi Sumatera Selatan akan meningkat sebesar Rp 2,075 juta. Oleh karena itu, sektor industri makanan, minuman, tembakau merupakan sektor yang paling cocok untuk dikembangkan oleh pemerintah dari segi nilai tambah. Nilai pengganda nilai tambah bruto untuk sektor penggalian sebesar 1,170. Merupakan penggandaan terkecil, hal ini dikarenakan peningkatan nilai tambah sektor penggalian tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap sektor lain secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 7. Hasil pengganda nilai tambah bruto untuk setiap sektor

No	Sektor	Nilai Tambah Bruto
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1,31094
2	Pertambangan minyak dan gas bumi	1,30000
3	Pertambangan batubara	1,97625
4	Penggalian	1,17058
5	Industri makanan, minuman, tembakau	2,07563
6	Listrik gas dan air bersih	2,02119
7	Bangunan atau konstruksi	2,20637
8	Perdagangan, hotel dan restoran	1,29186
9	Pengangkutan dan komunikasi	1,58639
10	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,26742
11	Jasa-jasa	1,46702

6. Keterkaitan Kedepan

Keterkaitan kedepan (*forward linkage*) merupakan hubungan keterkaitan antara satu sektor yang memberikan *output* bagi *input* sektor lainnya. Pada Tabel 8 dapat dilihat keterkaitan ke depan yang paling tinggi adalah sektor 5 (industri makanan, minuman, tembakau) yaitu sebesar 2,149 dengan nilai keterkaitan langsung sebesar 4,009. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 5 memiliki pengaruh yang besar untuk sektor lain menghasilkan *output* karena nilai keterkaitan kedepan lebih dari 1. Nilai keterkaitan total kedepan pada sektor pertambangan batubara sebesar 1,250 dan 1,429 untuk keterkaitan langsung ke depan.

Tabel 8. Hasil keterkaitan total dan langsung kedepan untuk setiap sektor

No	Sektor	Keterkaitan total kedepan	Keterkaitan langsung kedepan
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	0,8553	0,538
2	Pertambangan minyak dan gas bumi	1,1583	1,429
3	Pertambangan batubara	1,2501	1,429
4	Penggalian	0,6473	0,048
5	Industri makanan, minuman, tembakau	2,1499	4,009
6	Listrik gas dan air bersih	0,8115	0,536
7	Bangunan atau konstruksi	0,7127	0,296
8	Perdagangan, hotel dan restoran	0,9737	0,962
9	Pengangkutan dan komunikasi	0,7913	0,493
10	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,8572	0,716
11	Jasa-jasa	0,7928	0,545

7. Keterkaitan Kebelakang

Keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) merupakan hubungan keterkaitan antara satu sektor penerima *output* dari sektor lainnya. Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai keterkaitan kebelakang yang paling besar adalah sektor 3 (pertambangan batubara) yaitu dengan nilai keterkaitan kebelakang total sebesar 1,250 dan keterkaitan langsung ke belakang adalah 1,428. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan batubara memiliki keterkaitan yang besar dengan

sektor lain di industri hulunya. Nilai keterkaitan total kebelakang sektor penggalian hanya 0,794 dan terendah dibanding sektor-sektor lainnya. Artinya investasi pada sektor penggalian memberikan hasil yang lebih rendah daripada rata-rata sektor keterkaitan hulunya.

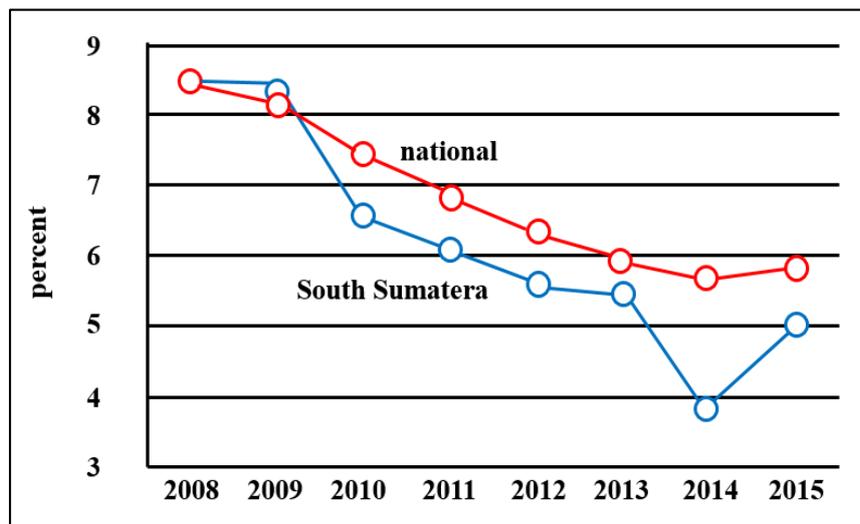
Tabel 9. Hasil keterkaitan total dan langsung kebelakang untuk setiap sektor

No	Sektor	Keterkaitan total kebelakang	Keterkaitan langsung kebelakang
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	0,8701	0,6861
2	Pertambangan minyak dan gas bumi	0,8241	0,6675
3	Pertambangan batubara	1,2501	1,4289
4	Penggalian	0,7949	0,4215
5	Industri makanan, minuman, tembakau	1,1941	1,4990
6	Listrik gas dan air bersih	1,1224	1,4615
7	Bangunan atau konstruksi	1,2493	1,5816
8	Perdagangan, hotel dan restoran	0,8583	0,6535
9	Pengangkutan dan komunikasi	1,0199	1,0692
10	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,8432	0,6103
11	Jasa-jasa	0,9736	0,9209

Pembahasan

1. Analisis Sektor Pertambangan dalam Segi Sosial Pengurangan Pengangguran

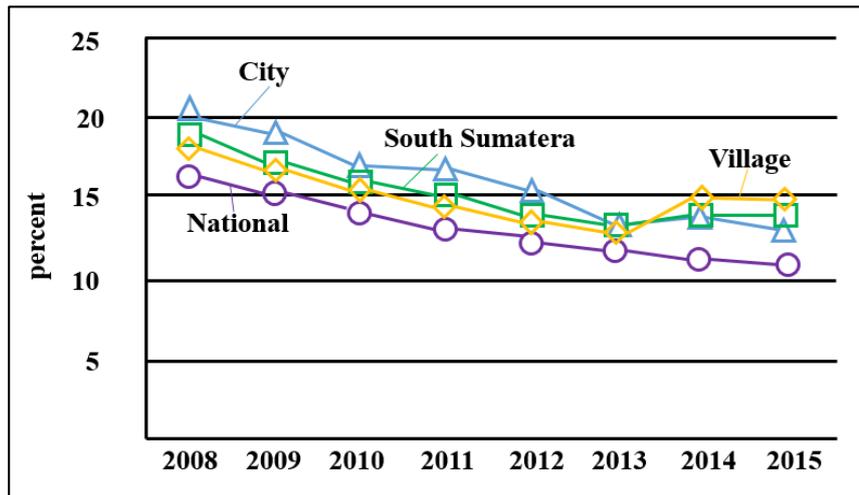
Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional, yang diperlihatkan pada Gambar 1. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada tahun 2008-2015, namun pada tahun 2015 tingkat pengangguran meningkat, menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2015 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2015 peningkatan angkatan kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2015 berkurang sebesar 3,42 persen (BPS, 2015).



Gambar 1. Persentase pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2015

Pengurangan Kemiskinan

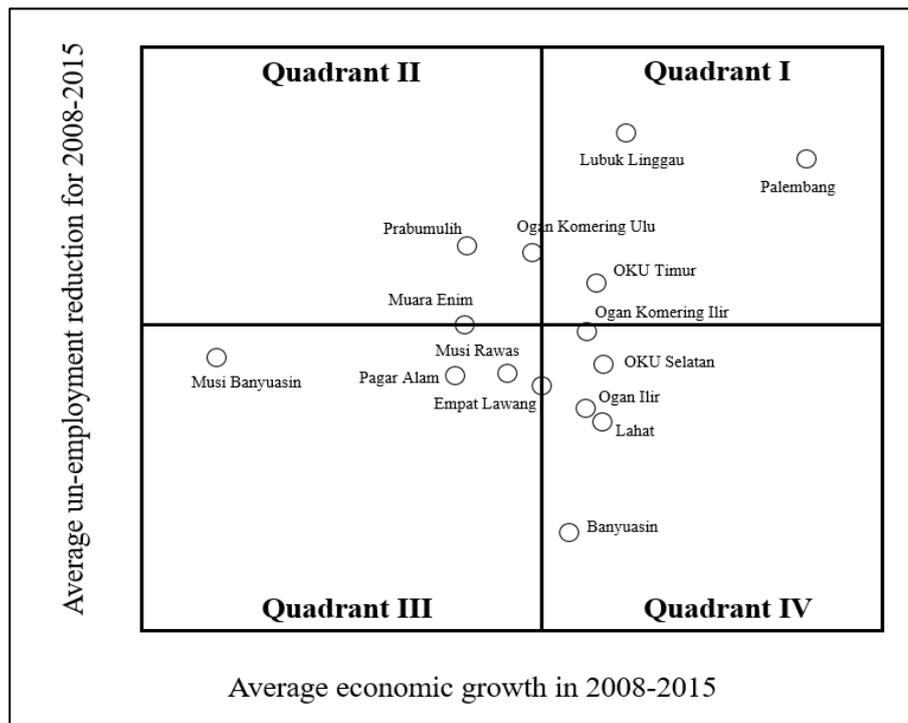
Selama kurun waktu 2008-2014 persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan telah berkurang sebesar 5,25 persen namun kemiskinan di wilayah ini masih tergolong tinggi dan berada diatas rata-rata nasional. Kemiskinan disebabkan karena struktur sosial dalam masyarakat, yaitu kurang mampunya memanfaatkan pengelolaan sumberdaya alam yang melimpah akibat terbatasnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki (BPS, 2015).



Gambar 2. Persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2015

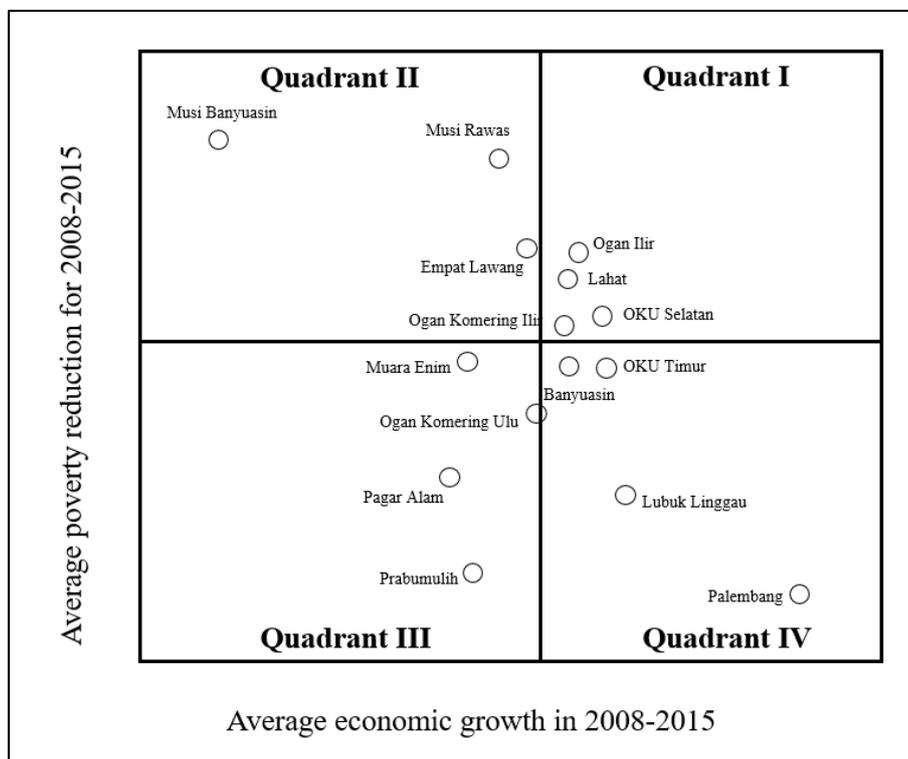
2. Analisis Sektor Pertambangan dalam Segi Ekonomi Keberhasilan Pertambangan Membangun Daerah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tercatat mencapai 5,51%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 mencapai Rp. 281,51 Triliun. Terdapat 5 sektor utama yang menunjang perekonomian daerah yakni, sektor pertambangan batubara 21,31%, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 17,12%, sektor industri pengolahan 18,92%, sektor konstruksi 11,94% dan sektor perdagangan 10,19%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pertambangan dan penggalian selalu menjadi penyumbang terbesar sejak tahun 2013-2017. Kontribusi sektor pertambangan dari hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) > 1. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki peran penting untuk pembangunan daerahnya (Yulianita, A. 2010).



Gambar 3. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan jumlah pengangguran Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2015

Gambar 3 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008- 2015. Pertama, Kabupaten OKU Timur, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Palembang termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Kedua, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Muara Enim, dan Kota Prabumulih yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Ketiga, Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. Keempat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKU Selatan, Ogan Ilir, Lahat, dan Banyuasin terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*highgrowth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut tidak diimbangi dengan penurunan jumlah pengangguran dengan laju yang sama. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.



Gambar 4. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2015

Gambar 4 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, dengan penjelasan sebagai berikut (BPS, 2015). Pertama, Kabupaten Ogan Ilir, Lahat, Ogan Komering Ilir, OKU Selatan termasuk daerah kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan

ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan. Kedua, Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Empat Lawang terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa. Ketiga, Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan (Muchtadin, 2022). Keempat, Kabupaten OKU Timur, Banyuasin, Kota Lubk Linggau, dan Kota Palembang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kegagalan Pertambangan Membangun Daerah

Wilayah tambang batubara yang luas tidak menjamin rendahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran warga sekitar. Tercatat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan 13,39% (Anonim, 2019). Kondisi ini terdapat pada Kabupaten Musi Rawas, sepertiga wilayah kabupaten itu adalah kawasan tambang, tetapi angka kemiskinan justru lebih tinggi dari angka rerata di Provinsi Sumatera Selatan. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2018 hingga saat ini mengalami fluktuatif, dan cenderung mengalami penurunan. Penurunan Kinerja Sektor Pertambangan dan penggalian yang menurun tersebut juga berdampak pada penurunan kontribusi penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan tergolong sektor yang *capital intensive* dan kurang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan batubara masih menjadi sektor unggulan yang memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan sektor pertambangan batubara mampu meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Sektor pertambangan juga mampu menggerakkan keseluruhan sektor perekonomian daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat dilihat dari perhitungan nilai pengganda untuk sektor pertambangan batubara yaitu pengganda *output* sebesar 1,97620, nilai pengganda pendapatan sebesar 1,97613, nilai pengganda surplus sebesar 1,98362 nilai pengganda pajak sebesar 1,98232, nilai pengganda nilai tambah bruto sebesar 1,2501, keterkaitan ke depan sebesar 1,429, dan keterkaitan ke belakang sebesar 1,428. Hal ini menandakan bahwa sektor pertambangan masih berperan dalam peningkatan pendapatan regional provinsi Sumatera Selatan selain sektor listrik, gas, dan air serta sektor konstruksi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2019. Anomali Kemiskinan di Wilayah Tambang Batubara. *JATAM*. Diakses pada <https://www.jatam.org/2019/08/21/anomali-kemiskinan-di-wilayah-tambang-batubara/>. (Accessed on 30 December 2020).
- BPS, 2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan*.
- Heriawan, R. 2008. *Tabel Input-Output Indonesia Updating 2008*. Badan Pusat Statistik.

- Muchtadin, M. 2022. Hubungan Manajemen Sumber Daya Manusia Hijau dan Kinerja Berkelanjutan: Tinjauan Literatur. *Jurnal Doktor Manajemen (JDM)*.
- Mudzakir, Abdul Kohar (2006) Analisis Keterkaitan Dan Dampak Pengganda Sektor Perikanan Pada Perekonomian Jawa Tengah : Analisis Input Output. In: Seminar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Agustus 2006, IPB.
- Murbarani, N. 2009. *Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Perekonomian Kota Palembang* (Input-Output Analisis).
- Rifai, B., Darmawan, D. A., Adam, L. 2007. Pembangunan Berkelanjutan Tinjauan Empiris. Pusat Penelitian Ekonomi. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jakarta.
- Suseno, T. 2018. Analisis Dampak Ekonomi Sektor Besi dan Baja Dasar Terhadap Perekonomian Nasional. *Statistika: Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*.
- Suseno, T. 2020. Analisis Dampak Peningkatan Batubara terhadap Struktur Perekonomian Kabupaten Muara Enim. *PUSLITBANG Teknologi Mineral dan Batubara*.
- Uguy, L. S. 1994. Penerapan Model Input-Output. *Biro Pembangunan Perkotaan, Pemukiman dan Perumahan Rakyat*. BAPPENAS.
- Yulianita, A. 2010. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Muara Enim, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8, No. 2.